

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN STUNTING DI DESA TANA TORO KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Risma<sup>1</sup>, Irwan<sup>2</sup>, Abdul Jabbar<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Univerditas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: rismaris934@gmail.com

Email: irwanirwan41083@gmail.com; jbr.nyonk1@gmail.com

**ABSTRACT**

This study aims to describe the role of the village government in addressing stunting in Tana Toro Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency. Stunting is a chronic nutritional problem that seriously impacts the quality of human resources. The village government plays a strategic role in addressing this problem by acting as a facilitator, mobilizer, and regulator in the implementation of various community health and nutrition programs. The approach used in this study was descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants included village officials, village midwives, integrated health post (Posyandu) cadres, and the local community. The results indicate that the Tana Toro Village Government has implemented several programs, such as stunting counseling, supplementary feeding, and routine checkups at the Posyandu. However, these efforts still face various obstacles, including limited infrastructure, low community participation, and limited knowledge among pregnant women and mothers of toddlers about the dangers of stunting. Furthermore, geographic and economic factors also hinder the optimization of stunting management programs. The role of village governments in stunting management is already underway, but not yet optimal. Innovative strategies and synergy between village governments, health workers, and the community are needed to improve program effectiveness. This research is expected to serve as a reference for other village governments in designing more comprehensive and participatory stunting management policies.

**Keyword:** role of village government, stunting, management, tana toro, participation, community.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan pemerintah desa dalam penanganan stunting di Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi kronis yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menanggulangi masalah ini melalui fungsi sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator dalam pelaksanaan berbagai program kesehatan dan gizi masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari perangkat desa, bidan desa, kader posyandu, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tana Toro telah menjalankan beberapa program seperti penyuluhan stunting, pemberian makanan tambahan, dan pemeriksaan rutin di posyandu. Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, dan minimnya pengetahuan ibu hamil serta ibu balita mengenai bahaya stunting. Selain itu, faktor geografis dan ekonomi turut menjadi hambatan dalam optimalisasi program penanganan stunting. Peranan pemerintah desa dalam penanganan stunting sudah berjalan, namun belum maksimal. Diperlukan strategi inovatif dan sinergi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa lainnya dalam merancang kebijakan penanganan stunting yang lebih komprehensif dan partisipatif.

**Kata kunci:** Peran Pemerintah Desa, Stunting, Penanganan, Tana Toro, Partisipasi, Masyarakat

## PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam penanggulangan stunting, baik melalui koordinasi dan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat desa maupun dengan memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk mendukung kegiatan terkait. Peran ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peran strategis nutrisi dalam pertumbuhan dan perkembangan mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemberian nutrisi yang tepat. Upaya perbaikan kualitas sumber daya dimulai dengan dukungan tumbuh kembang anak melalui gizi dan pengasuhan termasuk lingkungan keluarga. Gizi yang seimbang adalah susunan pangan yang dikonsumsi setiap hari yang mengandung zat gizi dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah permasalahan gizi. (Regita & Prathama, 2023) Faktor yang berpengaruh terhadap pemenuhan gizi seimbang balita adalah jenjang pendidikan dan kesadaran seorang ibu terhadap pentingnya mencukupi nutrisi yang dikonsumsi balita.

Permasalahan Stunting ini dibutuhkan langkah Peran dari pemerintah desa dalam rangka pencegahan dan penanganan Stunting. Demikian juga bagi desa Tana Toro, berbagai strategi yang dilakukan diantaranya pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita seperti susu dan vitamin, penyuluhan tentang Stunting dan pemeriksaan pertumbuhan anak yang berkelanjutan yang diadakan di Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU). (Studi et al., 2023) Namun, dalam keberlangsungannya peran pemerintah desa tersebut belum efisien untuk mengatasi Stunting karena membutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut berperan menangani masalah Stunting dan di desa tana toro sendiri masih banyak masalah-masalah yang mendasari atau menjadi penyebab terjadinya stunting yaitu masih minimnya informasi tentang bahaya stunting dimasyarakat terutama ibu-ibu yang sedang mengandung dan/atau memiliki anak balita, Kemudian sarana dan prasarana yang dalam hal ini yaitu alat pendukung dalam penanganan stunting yang kurang memadai.

Namun hal ini belum optimal karena adanya beberapa kendala, seperti kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan konsultasi stunting dan posyandu, karena mayoritas penduduk berkerja sebagai petani dan buruh tani serta senang berkerja untuk mencari nafkah. Sulitnya perjalanan dari rumah menuju lokasi posyandu yang jaraknya relatif jauh, dengan sendirinya menjadi tantangan dalam pelaksanaan program yang direncanakan. Dengan adanya kendala tersebut, pemerintah desa memerlukan inovasi diluar sosialisasi untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami dampak stunting optimal. Dengan adanya sosialisasi akan penting pemahaman pola hidup sehat dan pola asuh yang baik pada anak, layanan menunjang kegiatan di bidan kesehatan, guna menurunkan kasus stunting di desa Tana Toro.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang terbuka dan fleksibel, jenis pengumpulan datanya juga sangat beragam, disesuaikan dengan masalah, tujuan penelitian, dan sifat objek yang diteliti. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. (menteri kesehatan republik indonesia, 2019) Oleh karna itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya ,menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bertujuan memahami peran pemerintah desa dalam penanganan stunting secara mendalam melalui pengamatan dan interaksi langsung dengan informan.

## PEMBAHASAN

### Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanganan Stunting Di Desa Tana Toro

Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam penanganan stunting di desa Tana Toro maka peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara terhadap sekretaris desa dan salah satu tenaga Kesehatan yakni bidan desa Tanatoro selain itu peneliti juga melakukan dokumentasi, serta observasi terhadap kondisi poskesdes, fasilitas poskosdes, dan sarana prasarana di poskesdes dan kantor desa Tanatoro. Mengenai peranan pemerintah dalam penanganan stunting di Desa tana Toro diperoleh data bahwa peran pemerintah desa tana Toro dalam menangani stunting yaitu memberdayakan kader posyandu dan mengalokasikan dana desa untuk penanganan stunting. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penanganan stunting, peneliti akan menguraikan 3 (tiga) indikator peran pemerintah yaitu fasilitator, mobilisator, dan regulator, yang dikemukakan oleh Suhardono (2018).

#### 1. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah desa sangat penting dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui sosialisasi serta memberikan sarana yang memadai berupa timbangan bayi, alat ukur tinggi badan pada balita dan tempat pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Makkatang S.I.P selaku sekretaris desa tana Toro menyatakan bahwa

*“kami selaku pemerintah desa membentuk kader posyandu dan memberikan dana untuk makanan bergizi kepada bayi yang tergolong stunting, dan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk memfasilitasi, membimbing, dan memobilisasi masyarakat dalam mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi stunting. Misalnya, saya mendorong para ibu untuk menerapkan kebiasaan sehat, terutama selama kehamilan, dan dengan rutin menghadiri kegiatan penyuluhan. Awalnya, masyarakat tidak memahami arti stunting, tetapi sekarang mereka memahami pentingnya menjaga kesehatan dan menjaga lingkungan.”* (Hasil wawancara sekretaris desa 23 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa kepala desa tana Toro sudah bergerak di bidang pendampingan melalui sosialisasi serta bidang pendanaan dan juga permodalan. Berikut hasil wawancara dari ketua kader posyandu.

*“Kepala desa tana Toro menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan posyandu untuk kegiatan posyandu. Fasilitas ini berupa buku registrasi, timbangan bayi, dan alat ukur untuk belita”* (hasil wawancara ketua kader posyandu wulandari 23 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa ketua kader posyandu difasilitasi oleh pemerintah desa sudah cukup baik dengan adanya sarana dan prasarana serta pendanaan atau permodalan. Lebih lanjut beliau mengatakan

*“kami juga memberikan bantuan kepada ibu hamil dan juga balita yang setiap hari di poskesdes tana Toro membantu bidan desa dalam menangani ibu hamil dan anak stunting dalam pemberian makanan tambahan dan juga vitamin selama 30 hari berjalan.”*

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah bekerja dengan baik untuk masyarakat setempat dengan mengajak masyarakat untuk ikut sosialisasi bahwa pentingnya pencegahan stunting. Pemerintah desa sangat penting dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui sosialisasi serta memberikan sarana yang memadai berupa timbangan bayi, alat ukur tinggi badan pada balita dan tempat pelayanan kesehatan.

Jadi peran pemerintah telah memenuhi kebutuhan Masyarakat dengan baik dalam menjalankan atau melancarkan program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) sehingga ibu hamil dan balita terbebas dari gizi buruk tetapi, program PMT hanya berjalan selama 30 hari di desa tana Toro

#### 2. Pemerintah sebagai Mobilisator

Pemerintah sebagai Mobilisator adalah pihak yang mengarahkan atau menggerakkan masyarakat untuk mengambil tindakan nyata dalam penanganan stunting selain itu pemerintah menginspirasi dan memberikan informasi kepada orang tua balita, remaja guna untuk kepentingan bersama. Berikut adalah wawancara dengan bidan Desa.

*“ Peran saya sebagai bidan desa adalah untuk mengingatkan dan menyadarkan orang tua serta remaja untuk memberikan informasi dan mengedukasi ibu hamil dan orang tua balita serta memantau tumbuh kembang bayi setiap bulan secara terpadu di posyandu untuk mendeteksi dini stunting dan mengoptimalkan tinggi badan dan pemerintah bertugas untuk mengarahkan masyarakatnya yang memiliki balita stunting ke bidan untuk diukur dan ditimbang setiap bulan”.* (Hasil wawancara dengan bidan desa 23 juni 2025)

Berdasarkan hasil diatas maka dapat diketahui bahwa pemerintah desa tana toro ikut serta dalam penanganan stunting Bersama dengan tenaga Kesehatan yakni bidan desa tana toro. Demikian juga dengan hasil wawancara dengan ibu Wulandari selaku ketua kader mengatakan bahwa

*“ Saya berperan sebagai kader posyandu dalam pemberdayaan masyarakat dan juga memiliki peran penting dalam menggerakkan, memotivasi, dan menginspirasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan memperoleh kebutuhan dasar”.* (Hasil wawancara dengan kader posyandu 23 juni 2025)

*“Kami juga sebagai kader posyandu ikut serta dalam mengembangkan kemampuan mobilisasi sebagai kader posyandu ikut dalam pelatihan kader tapi itupun sekali kali karena kami kader posyandu Desa Tana Toro melakukan pelatihan, system pemantuan dan dukungan serta pengembangan kapasitas kader di poskesmas barukku.”* (Hasil wawancara dengan kader posyandu 23 juni 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa ketua kader posyandu memiliki peran sebagai mobilisator untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kebutuhan dasar. Berikut adalah hasil wawancara Masni dari salah satu Masyarakat :

*“Kami masyarakat diberi tahu oleh pemerintah desa atau kepala desa untuk mengikuti program pencegahan stunting yang pertama peningkatan gizi atau PMT untuk mencegah terjadi stunting.”* (Hasil wawancara masyarakat 24 juni 2025).

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan nyata dalam penanganan stunting selain itu pemerintah menginspirasi dan mengedukasi orang tua atau remaja guna untuk kepentingan bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai mobilisator untuk dapat menyadarkan dan memberitahukan kepada Masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting.

### 3. Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah berperan dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan.Serta menjalankan kebijakan dalam memandu penurunan stunting melalui program PMT (Pemberian Makanan Tambahan). Berikut hasil wawancara dengan Sekertaris Desa:

*“Bahwa kepala desa diarahkan dari pemerintah pusat untuk memandu masyarakat guna pencegahan stunting adapun cara atau langkah-langkah yang saya berikan kepada masyarakat yaitu saya mengarahkan masyarakat ke pos posyandu guna pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang anak dalam pencegahan penurunan stunting.”*(Hasil wawancara sekertaris desa 23 juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah desa memberikan arahan tentang pelaksanaan program-program yang berhasil untuk mengurangi stunting. Program ini mencakup pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita dan ibu hamil, serta memastikan tidak ada anggota Masyarakat yang mengalami atau terdeteksi stunting.

## 2. Upaya pemerintah dalam penurunan angka stunting di desa tana toro

Pemerintah Desa Tana Toro menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani permasalahan stunting melalui berbagai upaya strategis yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bidan Desa, Kader Posyandu, dan masyarakat, upaya-upaya tersebut mencerminkan peran aktif pemerintah desa sebagai fasilitator dalam memfasilitasi pelayanan dan kegiatan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Salah satu bentuk upaya nyata yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk program penanganan stunting, seperti penyediaan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil melalui kegiatan posyandu. Pemerintah desa bekerja sama dengan puskesmas dan kader posyandu dalam mendistribusikan makanan bergizi serta memberikan edukasi tentang pola makan sehat kepada keluarga yang memiliki balita.

Selain itu, pemerintah desa juga menyelenggarakan kegiatan penyuluhan Kesehatan Khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan gizi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dalam kegiatan ini, ibu hamil dan ibu menyusui diberikan informasi mengenai pentingnya ASI eksklusif, MP-ASI yang bergizi, dan praktik kebersihan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara dengan ibu Siti Patimah, A.md., Keb yang mengatakan bahwa :

*“Pemerintah memberikan dana untuk program makanan bergizi kemudian kami selaku tenaga Kesehatan dan para kader posyandu menjalankan programnya”*

Selaras dengan yang diutarakan ibu Siti Patimah, bapak Makkatang selaku sekretaris desa menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

*“ kami selaku pemerintah desa tana toro membentuk kader posyandu untuk membantu tenaga Kesehatan dalam menimbang dan mengukur balita setiap bulan dan memberikan dana desa kepada bidan untuk menjalankan program pemberian makanan bergizi kepada balita stunting”*

Meskipun program makanan bergizi stunting biasanya diberikan oleh pemerintah desa, terkadang juga biaya program makanan bergizi dibiayai penuh oleh puskesmas dalam hal ini yaitu puskesmas barukku. Seperti yang dikatakan ibu Siti Patimah selaku bidan desa Tana toro yang mengatakan bahwa

*“kami menjalankan program pemerintah yang dibiayai penuh oleh pemerintah desa setelah itu programnya dilanjutkan oleh puskesmas dan dibiayai langsung oleh puskesmas itu sendiri”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dan tenaga Kesehatan sangat berkaitan erat dalam penurunan stunting. Pemerintah memberikan dan membentuk kader sedangkan tenaga Kesehatan menjalankan programnya dibantu oleh kader yang dibentuk oleh pemerintah desa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Pemerintah Desa dalam penanganan stunting di Desa Tana Toro, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tana Toro telah menjalankan perannya sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana seperti alat ukur tinggi badan, timbangan bayi, serta mendukung kegiatan posyandu melalui pemberdayaan kader dan alokasi dana desa. Sebagai mobilisator, pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat, terutama ibu hamil dan ibu balita, untuk mengikuti program edukasi dan kegiatan posyandu dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi. Sebagai regulator, pemerintah menyusun arah kebijakan pelaksanaan program penanganan stunting dan memandu pelaksanaan kegiatan berdasarkan arahan pemerintah pusat. Selain itu, hubungan antara pemerintah desa dan tenaga kesehatan di desa sangat erat, di mana pemerintah menyediakan dukungan anggaran dan membentuk kader, sementara tenaga kesehatan menjalankan program intervensi gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak secara terpadu.

## REFERENSI

- Abdul Haris, & Miiftaakhul Amri. (2024). Peran Zakat dalam Mengatasi Stunting dan Gizi Buruk di Kabupaten Brebes. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 6(1), 1–30. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v6i1.10706>
- Aryanti, M. (2021). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan. *Pulau Sumbawa News*, 20(1), 4–9. <https://adjar.grid.id/read/543006208/peran-pemerintah-dalam-mengatasi-masalah-ketenagakerjaan?page=all>
- Batjo, S. H. (2022). *Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting Stunting Preventions and Treatments*.

9(2), 176–184.

- Dea Ayu Fitri. (2023). Peran Pemerintah Dalam Penanganan Stunting Pada Balita Di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 6. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.160>
- Fafo, I. J., Davidson, S. M., & Tauho, K. D. (2023). Potret Anak Stunting Usia 2-5 Tahun. *Jurnal Kesehatan Primer*, 8(2), 110–119.
- Fahrina, N., & Taupik, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting Dalam Perbaikan Gizi Anakdi Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *Japb*, 6(2), 1360–1379.
- Fernanda Hafidz, K., Sri Wulandari, A., Wiradinata, H., Studi Pendidikan Dokter, P., Kedokteran, F., Wijaya Kusuma Surabaya, U., Ilmu Kedokteran Jiwa, B., Wijaya Kusuma Surabaya Jalan Dukuh Kupang XXV No, U., Kupang, D., Dukuhpakis, K., Surabaya, K., & Timur, J. (2018). *Seminar Nasional COSMIC Ke-2 Kedokteran Komunitas 2 (1):121-127 Prosiding Seminar Nasional COSMIC Ke-2 Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*. 2(1), 121–127.
- Haria, D., Sembiring, K., Sebayang, J., & Simbolon, B. R. (2023). Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Stunting Desa Di Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. *Governance Opinion*, 8(1), 10–18.
- Kader, P., Pencegahan, D., Desa, D. I., Gede, B., Mewujudkan, U., Kintamani, K., Anak, R., Empowerment, C., Stunting, I. N., In, P., Gede, B., Make, T. O., District, K., & Friendly, C. (2024). *GENITRI : JURNAL PENGABDIAN CADRE EMPOWERMENT IN STUNTING PREVENTION IN BAYUNG GEDE VILLAGE*. 3, 57–63.
- Lestari, P., Pralistami, F., Ratna, D., Hamijah, S., & Harahap, R. A. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 2227. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v22i3.2789>
- menteri kesehatan republik indonesia. (2019). Pencegahan Stunting. *Ayaa*, 8(5), 55.
- Mubaroq, M. H., & Wachid, A. (2024). Upaya Pemerintah Daerah Kudus Dalam Pencegahan Stunting. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.31596/jkm.v12i1.2147>
- Mujianto, M. (2016). *Pengantar Teknologi Pangan* (Issue December).
- Novianti, R. et al. (2018). Peran Posyandu untuk Menangani Stunting di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(3), 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/31425/25611>
- P2, E. (2024). *PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DANA BANTUAN SOSIAL*. *Table 10*, 4–6.
- Pemerintah, P., & Dalam, D. (2024). *STUNTING DI DESA OMBOLATA SAWO KECAMATAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area RIDWAN TELAUMB*.
- Pokhrel, S. (2024). Peran pemerintah daerah dalam penanganan stunting di kabupaten bone. *Ayaa*, 15(1), 37–48.
- Rahmadani, S., & Lubis, S. (2023). Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka stunting berdasarkan perpres 72 tahun 2021. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 188. <https://doi.org/10.29210/1202322804>
- Rahmah, M., Dahlawi, & Rahman, A. (2022). Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 7(3), 25–32. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/20603>
- Regita, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting.

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

56

Indexed



SINTA 5



*Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 121–128.

Rif'an, Abid, & Sutinem. (2024). Kinerja Pegawai, Gaya Kepemimpinan, dan Motivasi: Pengaruhnya terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Serah, Kabupaten Gresik. *JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia*, 5(1), 56–66. <https://doi.org/10.46510/jami.v5i1.290>

Saputri, R. A. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2(2), 152–168. <https://doi.org/10.36341/jdp.v2i2.947>

Shofia, E. U. M. N. J. K. A. (2025). Turunkan Stunting Melalui Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Di Desa Banjaragung Kabupaten Jepara. *Jurnal Bina Desa*, 0(0).

Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Sintuwu, U., & Poso, M. (2023). *PENANGANAN STUNTING DI DESA*.

Sukaesi Selpi. (2024). *Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Stunting*. 1–67.

Sumiati, Linda, I. N., Pratiwi, P. I., & Melastini, A. P. (2024). Optimalisasi Pemenuhan Gizi Balita di Banjar Dinas Dauh Pura Desa Panji. *Genitri: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Kesehatan*, 3(1), 26–32. <https://doi.org/10.36049/genitri.v3i1.232>

Syaekhu, A., Handayani, S., Harlina Haruna, N., Usia Dini, A., & Author, C. (2023). *MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaborasi Membangun Generasi Sehat Sejak Dini Kata Kunci: History Article. November 2023*. <https://doi.org/10.31100/matappa.v6i4.3166>

Ummah, M. S. (2019). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN STUNTING DI DESA KONTUMERE KECAMATAN KABAWO KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA NUR*. 11(1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)